

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

1.1.1. Maksud Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi dan seluruh transaksi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Jawa Tengah di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) RSUD Prof. dr. Margono Soekarjo Purwokerto selama satu periode pelaporan. Laporan terutama digunakan membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya peraturan perundang-undangan.

SKPD RSUD Prof. dr. Margono Soekarjo Purwokerto selaku entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan :

a. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

b. Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh asset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

c. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

d. Keseimbangan Antargenerasi

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

1.1.2. Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan keuangan SKPD RSUD Prof. dr. Margono Soekarjo Purwokerto menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan, baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan :

- a. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh anggaran.
- b. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan perturan perundang-undangan.
- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatan dan mencukupi kebutuhan kasnya.
- e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang.
- f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, transfer, dana cadangan, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana, dan arus kas RSUD Prof. dr. Margono Soekarjo Purwokerto sebagai suatu entitas pelaporan.

Laporan keuangan RSUD Prof. dr. Margono Soekarjo Purwokerto terdiri dari:

a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh RSUD Prof. dr. Margono Soekarjo Purwokerto dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan sebagai berikut :

1. Pendapatan
2. Belanja
3. Transfer
4. Surplus/defisit
5. Pembiayaan
6. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

LPSAL merupakan komponen laporan keuangan yang menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berupa Saldo Anggaran Lebih awal, Penggunaan

Saldo Anggaran Lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan, Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya, dan Saldo Anggaran Lebih Akhir.

c. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Aset diklasifikasikan dalam aset lancar dan non lancar serta kewajiban diklasifikasikan menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang dalam neraca. Setiap pos aset dan kewajiban diungkapkan mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Neraca mencantumkan pos-pos berikut :

1. Kas dan setara kas
2. Investasi jangka pendek
3. Piutang pajak dan bukan pajak
4. Persediaan
5. Investasi jangka panjang
6. Aset tetap
7. Kewajiban jangka pendek
8. Kewajiban jangka panjang
9. Ekuitas

d. Laporan Operasional (LO)

LO merupakan komponen laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan. Disamping melaporkan kegiatan operasional, LO juga melaporkan transaksi keuangan dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa yang merupakan transaksi di luar tugas dan fungsi utama entitas.

e. Laporan Arus Kas (LAK)

LAK adalah bagian dari laporan keuangan yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktifitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris.

f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

LPE merupakan komponen laporan keuangan yang menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos ekuitas awal, surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, dan ekuitas akhir.

g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

CaLK merupakan komponen laporan keuangan yang meliputi penjelasan, daftar rincian dan/atau analisis atas laporan keuangan dan pos-pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, Neraca, LO, LAK, dan LPE. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi

yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) serta diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintah serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian wajar laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan/atau komitmen-komitmen lainnya.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan.

Pelaporan keuangan RSUD Prof. dr. Margono Soekarjo Purwokerto diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, antara lain:

- A. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya bagian yang mengatur keuangan Negara;
- B. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- C. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- D. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
- E. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
- F. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
- G. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
- H. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- I. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- J. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, juga mengatur bahwa penerapan SAP berbasis akrual pada pemerintah daerah paling lambat mulai Tahun Anggaran 2015
- K. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 tahun 2011 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2012.
- L. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 68 tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- M. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 120 tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Jawa Tengah.

- N. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 921/0017982 Tanggal 25 Oktober 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan APBD dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2016.

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 120 tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Jawa Tengah, maka sistematika isi catatan atas laporan keuangan RSUD Prof. dr. Margono Soekarjo Purwokerto Tahun Anggaran 2015 adalah sebagai berikut:

Bab 1 Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penyajian Catatan atas Laporan Keuangan

Bab 2 Ekonomi Makro dan Kebijakan Keuangan

- 2.1. Ekonomi Makro
- 2.2. Kebijakan Keuangan

Bab 3 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 1.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 1.2. Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan

Bab 4 Kebijakan Akuntansi

- 4.1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 4.2. Basis dan Prinsip Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3. Kebijakan Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan
- 4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan Ketentuan yang ada Dalam SAP pada SKPD

Bab 5 Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan

- 5.1. Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran
 - 5.1.1. Penjelasan Pos-Pos Pendapatan
 - 5.1.2. Penjelasan Pos-Pos Belanja
- 5.2. Penjelasan Pos-pos Neraca
 - 5.2.1. Aset
 - 5.2.2. Kewajiban
 - 5.2.3. Ekuitas
- 5.3. Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional
 - 5.3.1. Pendapatan-LO
 - 5.3.2. Beban
 - 5.3.3. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional
- 5.4. Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas
- 5.5. Catatan Penting Lainnya

Bab 6 Penjelasan atas Informasi Non Keuangan

Bab 7 Penutup

Lampiran Tambahan

BAB 2

EKONOMI MAKRO DAN KEBIJAKAN KEUANGAN

2.1 Ekonomi Makro

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Sedangkan keuangan daerah adalah hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.

Dalam Struktur Pemerintah Daerah. RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto merupakan suatu entitas akuntansi yang mempunyai kewajiban melakukan pencatatan atas transaksi-transaksi yang terjadi di lingkungan satuan kerja yang dipengaruhi oleh situasi ekonomi secara makro antara lain :

- Tuntutan masyarakat untuk mewujudkan informasi keuangan yang transparan dan akuntabilitas semakin tinggi.
- Tingkat daya beli masyarakat untuk mendapatkan jasa pelayanan kesehatan.
- Adanya persiapan dengan rumah sakit baik milik pemerintah maupun swasta yang kompetitif, baik dari tarif dan bentuk pelayanan.
- Adanya globalisasi dilingkungan jasa pelayanan kesehatan yang ditandai dengan masuknya/ didirikannya Rumah Sakit Berstandar Internasional (International Hospital).
- Tingkat inflasi yang belum stabil/Fluktuatif yang menyebabkan kenaikan harga-harga bahan baku rumah sakit (antara lain : obat-obatan, alat kesehatan, bahan penunjang lainnya, dll)

2.2. Kebijakan Keuangan

Kebijakan keuangan Jawa Tengah mengacu pada kebijakan keuangan nasional. Fokus kebijakan keuangan ditujukan pada keunggulan daerah masing-masing. Jawa Tengah masih termasuk dalam daerah yang menarik sebagai tujuan investasi, sehingga pertumbuhan investasi Jawa Tengah cukup tinggi. Relokasi pasar tujuan ekspor mendorong perbaikan kinerja ekspor.

Dengan kebijakan yang telah diuraikan diatas, maka sektor Pertanian, Perdagangan, Hotel dan restoran serta jasa usaha lainnya mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan.

Dalam rangka penatausahaan pengelolaan keuangan yang baik pendapatan dan belanja di RSUD Prof. dr. Margono Soekarjo Purwokerto tahun anggaran 2016 agar terwujud keterpaduan dan keserasian dalam melaksanakan program kegiatan sehingga tepat waktu, tepat mutu, tertib administrasi, tepat sasaran, dan manfaat serta disiplin anggaran maka diambil langkah-langkah kebijakan keuangan berupa :

- Pengembangan jenis/produk dan cakupan pelayanan dalam rangka peningkatan potensi-potensi pendapatan rumah sakit.
- Peningkatan cost recovery dalam rangka menciptakan kemandirian secara finansial.
- Pengendalian belanja/biaya rumah sakit (*Cost Contiment Strategy*) dengan memperbaiki etos kerja karyawan rumah sakit.
- Pemberlakuan pelaksanaan kegiatan akuntansi yang berbasis akrual.
- Pengembangan Sistem Informasi Akuntansi dengan teknologi komputer (*Computerized*).
- Penyesuaian tarif berdasarkan peraturan daerah dengan memperhitungkan tingkat ekonomi dan daya beli masyarakat serta daya saing pengguna jasa pelayanan kesehatan.

BAB 3
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Sampai dengan akhir tahun anggaran 2016 ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan RSUD Prof. dr. Margono Soekarjo Purwokerto sesuai dengan Laporan Realisasi Anggaran tahun berjalan dapat dilihat sebagai berikut :

1. Realisasi Pendapatan RSUD Prof. dr. Margono Soekarjo

Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja RSUD Prof. dr. Margono Soekarjo Tahun Anggaran 2016, realisasi pendapatan seluruhnya berjumlah Rp306.062.018.872 atau 105,54% dari target Anggaran Pendapatan yang direncanakan Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp 290.000.000.000 Hal ini berarti melebihi target penerimaan sebesar Rp 28.663.407.012 atau 10,33%. Pendapatan tersebut terdiri dari pendapatan pengembalian belanja TA.2015 sebesar Rp0,00 dan pendapatan dari BLUD Rp306.062.018.872.

Rincian realisasi pendapatan sebagai berikut :

Tabel Realisasi Pendapatan TA 2016 dan TA 2015

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Anggaran	REALISASI		
			2016	%	2015
1	Pendapatan dari Pengembalian	-	-	0,00%	19.980.000
2	Pendapatan BLUD	290.000.000.000	306.062.018.872	105,54%	277.378.631.860
	1. Pendapatan Pelayanan	281.000.000.000	295.150.337.012	105,04%	266.648.979.156
	2. Pendapatan Diklat	1.900.000.000	1.319.110.000	69,43%	1.243.797.000
	3. Pendapatan Lainnya	7.100.000.000	9.592.571.860	135,11%	9.485.855.704
	Jumlah	290.000.000.000	306.062.018.872	105,54%	277.398.611.860

2. Realiasis Belanja RSUD Prof dr Margono Soekarjo

Realisasi belanja RSUD Prof. dr. Margono Soekarjo Tahun Anggaran 2016 sampai dengan Tahun Anggaran berakhir seluruhnya berjumlah Rp 414.621.911.480 atau 81,03% dari target Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp 511.701.091.000 yang terdiri dari Realisasi Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 91.779.385.376 atau 82,97% dari target Anggaran Belanja Tidak Langsung yaitu sebesar Rp 110.613.951.000 dan Realisasi Belanja Langsung sebesar Rp 322.842.526.104 atau 80,49% dari target Anggaran Belanja Langsung yaitu sebesar Rp 401.087.140.000.

Tabel Realisasi Belanja TA.2015

					(Dalam Rupiah)
No.	Uraian	Anggaran	REALISASI		
			2016	%	2015
Belanja Daerah					
1	Belanja Tidak Langsung	110.613.951.000	91.779.385.376	82,97%	96.666.264.938
2	Belanja Langsung	401.087.140.000	322.842.526.104	80,49%	360.525.276.535
	1. Belanja Pegawai	28.500.000.000	24.732.072.522	86,78%	20.739.032.620
	2. Belanja Barang dan Jasa	300.349.396.000	234.996.659.935	78,24%	215.664.457.292
	3. Belanja Modal	72.237.744.000	63.113.793.647	87,37%	124.121.786.623
Jumlah		511.701.091.000	414.621.911.480	81,03%	457.191.541.473

3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Pencapaian Realisasi Kinerja keuangan RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo dapat diketahui bahwa realisasi pencapaian sebesar 81.03%. Hal ini menunjukkan kinerja RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo sudah baik semua program berjalan dengan baik. Adapun hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

- Adanya kebutuhan-kebutuhan yang harus segera dipenuhi guna pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
- Pengawasan tentang pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016 belum optimal.

Adapun ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Tahun Anggaran 2016 Keuangan RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo adalah sebagai berikut :

IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN SKPD

TAHUN ANGGARAN 2016

Satuan Kerja Perangkat Daerah : RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto

Fungsi :

Sub Fungsi :

Provinsi : Jawa Tengah

No.	Program/ Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi	Realisasi		Keterangan (Tidak Terserapnya Anggaran ≤ 96%)
		Rp.	Rp.	Fisik (%)	Keu (%)	
1	2	3	4	5	6=4/3x100	7
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	4.153.420.000,00	4.137.278.699,00	100	99,61%	
	Penyediaan bahan logistik kantor	4.153.420.000,00	4.137.278.699,00	100	99,61%	
2	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.564.222.000,00	1.564.221.692,00	100	100,00%	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran	1.564.222.000,00	1.564.221.692,00	100	100,00%	
3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	346.500.000,00	346.500.000,00	100	100,00%	
1	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	346.500.000,00	346.500.000,00	100	100,00%	
4	Program Pelayanan Kesehatan	31.422.786.000,00	30.990.277.872,00	100	98,62%	
1	Kegiatan Pemenuhan Sarana Pelayanan Kesehatan	396.400.000,00	370.172.864,00	100	93,38%	Sisa Tender
2	Kegiatan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Rujukan (DAK)	6.026.386.000,00	6.012.130.999,00	100	99,76%	
3	Kegiatan Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok	25.000.000.000,00	24.607.974.009,00	100	98,43%	
5	Program Promosi dan Pemberdayaan	-	-	0,00	0,00%	
1	Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat	-	-	0,00	0,00%	
6	Prog. Peningkatan Mutu Pelay. Kesehatan BLUD	359.905.354.000,00	282.109.390.381,00	100	78,38%	Efisiensi Anggaran
1	Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan	359.905.354.000,00	282.109.390.381,00	100	78,38%	

BAB 4

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi di RSUD Prof dr. Margono Soekarjo Purwokerto Tahun Anggaran 2016 sesuai dengan Peraturan 120 tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Jawa Tengah dan Keputusan Direktur/Pemimpin BLUD Nomor :445/32470/XII / 2015 tentang Kebijakan Akuntansi BLUD adalah sebagai berikut :

4.1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas adalah unit pemerintahan daerah yang terdiri dari entitas akuntansi yang menurut peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan pelaporan keuangan. Entitas pelaporan yang dimaksud dalam laporan keuangan ini adalah Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto.

4.2. Basis dan Prinsip Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam pelaporan keuangan adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam Neraca.

Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah. Pemerintah Daerah tidak menggunakan istilah laba, melainkan menggunakan sisa perhitungan anggaran (lebih/kurang) untuk setiap tahun anggaran. Sisa perhitungan anggaran tergantung pada selisih realisasi pendapatan dan pembiayaan penerimaan dengan belanja dan pembiayaan pengeluaran.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah.

Entitas pelaporan yang menyajikan Laporan Kinerja Keuangan menyelenggarakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan dengan menggunakan sepenuhnya basis akrual, baik dalam pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan, maupun dalam pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Namun demikian, penyajian Laporan Realisasi Anggaran tetap berdasarkan basis kas. Jika diharuskan oleh ketentuan perundang-undangan, entitas pelaporan yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan berbasis akrual, tetap menyusun Laporan Realisasi Anggaran yang berbasis kas.

Basis akrual untuk pengakuan pendapatan, belanja, aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca. Basis akrual berarti bahwa transaksi diakui dan dicatat pada saat terjadinya.

4.3. Kebijakan Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan

- a. Pelaporan keuangan merupakan satu kesatuan yang terdiri dari laporan keuangan, catatan atas laporan keuangan, dan informasi tambahan yang harus disajikan bersama-sama.
- b. Komponen laporan keuangan pokok terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
- c. Laporan arus kas disajikan dengan metode langsung.
- d. Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut :
 - 1) Menyajikan informasi tentang ekonomi makro, kebijakan fiskal/keuangan dan pencapaian target perda APBD berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
 - 2) Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja selama tahun pelaporan;
 - 3) Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
 - 4) Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.
- e. Basis Akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan RSUD Prof dr. Margono Soekarjo Purwokerto, adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam neraca.
- f. Entitas pelaporan mengacu pada konsep bahwa setiap pusat pertanggungjawaban harus bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

4.3.1. Pendapatan

- a. Pendapatan dari jasa layanan dan pendapatan lainnya diakui pada saat diterima atau hak untuk menagih timbul sehubungan dengan adanya barang/jasa yang diserahkan.
- b. Pendapatan diklasifikasikan antara lain Pendapatan usaha dari jasa layanan, Pendapatan Hibah, Pendapatan APBN, Pendapatan hasil kerjasama dengan pihak lain, dan Pendapatan lainnya.
- c. Akuntansi Pendapatan diakui pada saat seharusnya pendapatan diterima.
- d. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang atas penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurangan pendapatan pada periode yang sama.
- e. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dibebankan pada belanja tidak terduga sebagai pengurang ekuitas dana lancar pada akun SiLPA pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.
- f. Pengukuran Pendapatan usaha lainnya dicatat sebesar nilai wajar imbalan yang diterima atau yang dapat diterima.

- g. Pengungkapan Pendapatan disajikan secara terpisah pada laporan keuangan untuk setiap jenis pendapatan. Rincian jenis pendapatan diungkapkan pada Catatan Atas Laporan Keuangan.

4.3.2. Biaya

a. Pengertian

Biaya adalah penurunan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar kas atau berkurangnya Aset atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas bersih baik merupakan penurunan Aset (amortisasi) atau meningkatnya tanggung jawab (akrual/ pembebanan/ pengakuan biaya ybs.)

b. Klasifikasi Biaya

1. Biaya Layanan

Seluruh biaya yang terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat, antara lain meliputi biaya pegawai, biaya bahan, biaya jasa pelayanan, biaya pemeliharaan sarana medik, biaya barang dan jasa, dan biaya langsung lainnya yang berkaitan langsung dengan pelayanan. Pengakuan Biaya Layanan diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan penurunan Aset atau peningkatan kewajiban

2. Biaya Umum dan Administrasi

Merupakan biaya-biaya yang diperlukan untuk administrasi dan biaya yang bersifat umum dan tidak terkait secara langsung dengan kegiatan pelayanan. Biaya ini antara lain meliputi biaya pegawai, biaya administrasi perkantoran, biaya pemeliharaan, biaya langganan daya dan jasa, dan biaya promosi. Pengakuan Biaya Umum dan Administrasi diakui pada saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan penurunan Aset atau peningkatan kewajiban dan dapat diukur dengan andal.

3. Biaya Lainnya

Merupakan biaya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam biaya layanan dan biaya umum dan administrasi. Biaya ini antara lain meliputi biaya bunga dan biaya administrasi bank. Pengakuan Biaya diakui pada saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan penurunan Aset atau peningkatan kewajiban dan dapat diukur dengan andal.

4. Biaya Tak Terduga

Merupakan biaya yang tidak dapat di perkirakan/prediksi sejak awal, biaya yang tidak diharapkan terjadi dan tidak diharapkan terjadi berulang. Biaya ini antara lain akibat bencana alam, kebakaran, perampokan, pencurian, dan kecelakaan. Pengakuan Biaya ini diakui setelah kejadian tersebut terjadi dan sudah dihitung dan ditetapkan kerugiannya oleh yang expert (tim ahli penilai).

5. Kapitalisasi Aset

Kapitalisasi adalah batasan dalam penentuan pengeluaran, apakah akan dicatat sebagai suatu Aset tetap atau pengeluaran untuk mendapatkan penghasilan.

6. Nilai satuan minimum kapitalisasi Aset tetap sesuai dengan Pergub Provinsi Jawa Tengah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Kebijakan dan Sistem Akuntansi Pemerintah Jawa Tengah adalah sebagai berikut :
 - a. Pengeluaran untuk satuan peralatan dan mesin yang sama dengan atau lebih dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); dan
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan dan yang sama dengan atau lebih dari Rp20.000.000,00 (duapuluh juta rupiah);
 - c. Nilai satuan minimum kapitalisasi Aset tetap dikecualikan terhadap pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan Aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang corak kesenian.
- c. Pengukuran
Biaya dan kerugian dicatat sebesar Jumlah kas yang dibayarkan jika seluruh pengeluaran tersebut dibayar pada periode berjalan; Jumlah biaya periode berjalan yang harus dibayar pada masa yang akan datang; Alokasi sistematis untuk periode berjalan atas biaya yang telah dikeluarkan dan Jumlah kerugian yang terjadi.
- d. Pengungkapan
Biaya disajikan pada laporan keuangan terpisah untuk setiap jenis biaya. Rincian jenis biaya diungkapkan pada CaLK.

4.3.3. Aset

- a. Pengertian Aset
Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh BLUD sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh serta dapat diukur dalam satuan uang.
- b. Klasifikasi Aset
 1. Aset Lancar
 - a. Pengertian
Diperkirakan akan direalisasikan atau dimiliki untuk dijual atau digunakan dalam jangka waktu 12 bulan atau dimiliki untuk diperdagangkan atau untuk tujuan jangka pendek dan diharapkan akan direalisasikan dalam jangka waktu 12 bulan dari tanggal neraca.
 - b. Klasifikasi Aset Lancar
 - (1) Kas dan Setara kas
 - a) Pengertian
Kas adalah uang tunai atau saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan BLUD. Setara kas (*cash equivalent*) merupakan bagian dari Aset lancar yang sangat likuid, yang

- dapat dikonversi menjadi kas dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) bulan tanpa menghadapi resiko perubahan nilai yang signifikan, tidak termasuk piutang dan persediaan.
- b) Pengakuan

Kas dan setara kas diakui pada saat diterima oleh BLUD.
 - c) Pengukuran

Kas dan setara kas diukur sebesar nilai nominal pada saat diterima.
 - d) Penyajian dan Pengungkapan

Kas dan setara kas merupakan akun yang paling likuid (lancar) dan lazim disajikan pada urutan pertama unsur aset dalam neraca.

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan adalah:

 - a. Kebijakan yang diterapkan dalam menentukan komponen kas dan setara kas.
 - b. Rincian jenis dan jumlah kas dan setara kas.

(2)Piutang

- a) Pengertian

Hak yang timbul dari penyerahan barang atau jasa dalam rangka kegiatan operasional.
- b) Pengakuan

Piutang diakui pada pada saat hak untuk menagih sehubungan adanyajasa/ tindakan pelayanan yang telah dilakukan terhadap pasien.
- c) Pengukuran
 - a. Piutang diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan setelah memperhitungkan nilai penyisihan piutang tak tertagih.
 - b. Penyisihan kerugian piutang tak tertagih dibentuk sebesar nilai piutang yang diperkirakan tidak dapat ditagih berdasarkan daftar umur piutang. Atas dasar daftar umur piutang dibuat cadangan piutang tidak tertagih dengan kebijakan sebagai berikut :

Tabel Perhitungan Umur Piutang :

No	Status	Lama Menunggak	% Cad. Tidak Tertagih
1.	Lancar	< 1 Tahun	0,05%
2.	Kurang Lancar	1 sampai dengan 2 Tahun	10%
3.	Kurang Lancar	Diatas 2 sampai 3 Tahun	50%
4.	Tidak Lancar	Diatas 3 sampai 5 Tahun	50%
5.	Macet	Diatas 5 Tahun	100%

c. Penghapusan piutang tak tertagih dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku (dimana piutang yang lebih dari 5 (lima) tahun diajukan ke Gubernur untuk persetujuan penghapusan piutang).

d) Penyajian dan Pengungkapan

a. Piutang usaha yang jatuh tempo dalam waktu kurang dari satu tahun disajikan pada kelompok aset lancar dalam neraca. Sedangkan piutang usaha yang jatuh tempo lebih dari satu tahun disajikan dalam kelompok aset non lancar.

b. Piutang usaha disajikan sebesar jumlah bersih, yaitu jumlah seluruh tagihan piutang dikurangi dengan penyisihan kerugian piutang.

c. Hal-hal yang diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan:

- i. rincian jenis dan jumlah piutang;
- ii. jumlah piutang dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa;
- iii. jumlah penyisihan kerugian piutang yang dibentuk disertai daftar umur piutang;
- iv. kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam pembentukan penyisihan kerugian piutang;
- v. jumlah piutang yang dijadikan agunan;
- vi. jumlah piutang yang dijual (anjak piutang).

(3) Persediaan

a) Pengertian

Persediaan adalah Aset yang diperoleh dengan maksud untuk dijual dalam kegiatan usaha normal, digunakan dalam proses produksi dalam bentuk bahan atau perlengkapan (*supplies*).

b) Pengakuan

Persediaan diakui pada saat barang diterima atau dihasilkan dan berkurang pada saat dipakai, dijual, kadaluarsa, atau rusak.

c) Pengukuran

Persediaan diukur berdasarkan sebesar harga perolehannya, dan untuk penyimpanannya dengan menggunakan metode MPKP (Masuk Pertama Keluar Pertama), dan penjualannya berdasarkan harga terakhir (harga pasar). Persediaan perlengkapan (*supplies*) habis pakai yang tidak dapat dikaitkan langsung dengan kegiatan operasional BLUD dinilai sebesar harga perolehannya.

d) Penyajian dan Pengungkapan

a. Persediaan disajikan pada kelompok aset lancar dalam neraca.

- b. Persediaan yang tersedia untuk dijual disajikan sebesar nilai perolehan atau nilai realisasi bersih (*the lower of cost and net realizable value*).
- c. Setiap akhir bulan dilakukan pemeriksaan fisik persediaan di masing-masing unit dan dibuat laporannya.
- d. Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik (*stock opname*), dengan dilampiri Berita Acara hasil stock opname per 31 Desember pada tahun berjalan.
- e. Hal-hal yang diungkapkan dalam laporan keuangan antara lain:
 - i. kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;
 - ii. jenis persediaan, harga perolehan, nilai realisasi bersih, dan nilai tercatat di neraca;
 - iii. jumlah dari setiap pemulihan dari setiap penurunan nilai yang diakui sebagai penghasilan selama periode;
 - iv. kondisi atau peristiwa penyebab terjadinya pemulihan nilai persediaan yang diturunkan;
 - v. nilai tercatat persediaan yang diperuntukkan sebagai jaminan kewajiban.

(4)Uang Muka

a) Pengertian

Menurut tujuan penggunaannya dibagi menjadi dua jenis, yaitu uang muka kegiatan dan uang muka pembelian barang/jasa. Uang muka kegiatan adalah pembayaran di muka untuk suatu kegiatan mendesak yang belum diketahui secara pasti jumlah biaya/ pengeluaran sebenarnya dan harus dipertanggung-jawabkan setelah kegiatan tersebut selesai. Uang muka pembelian barang/ jasa adalah pembayaran uang muka kepada pemasok/ rekanan atas pembelian barang dan jasa yang saat pembayaran tersebut barang dan jasa belum diterima. Pembayaran di muka tersebut harus diperhitungkan sebagai bagian pembayaran dari barang dan jasa yang diberikan pada saat penyelesaian.

b) Pengakuan

Uang muka diakui pada saat pembayaran, uang muka kegiatan berkurang pada saat dipertanggungjawabkan, uang muka pembelian barang/jasa berkurang pada saat barang/jasa diterima.

c) Pengukuran

Uang muka diukur sejumlah nilai nominal yang dibayarkan.

d) Penyajian dan Pengungkapan

- a. Uang muka disajikan pada kelompok aset lancar di neraca.

- b. Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain rincian jenis dan jumlah uang muka serta batas waktu pertanggungjawaban.

(5) Biaya di Bayar di Muka

a) Pengertian

Pembayaran di muka yang manfaatnya akan diperoleh pada masa yang akan datang. Biaya dibayar di muka berfungsi untuk membiayai operasional jangka, misalnya premi asuransi dan sewa dibayar di muka.

b) Pengakuan

Biaya dibayar di muka diakui sebagai pos sementara pada saat pembayaran, diakui sebagai biaya pada saat jasa diterima, dan berkurang pada saat jasa diterima atau berlalunya waktu

c) Pengukuran

Biaya dibayar di muka diukur sebesar jumlah uang yang dibayarkan atas prestasi atau jasa yang diterima.

d) Penyajian dan Pengungkapan

a. Biaya dibayar di muka disajikan pada kelompok aset lancar dalam neraca.

b. Biaya dibayar di muka disajikan secara netto.

2. Aset Tidak Lancar

a. Pengertian

Aset yang digunakan secara langsung atau tidak langsung dan tidak memenuhi kriteria Aset lancar.

b. Klasifikasi Aset Tidak Lancar

(1) Investasi Jangka Panjang

a) Pengertian

Investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang terdiri dari investasi permanen dan non permanen.

Investasi non-permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi jenis ini diharapkan akan berakhir dalam jangka waktu tertentu, seperti pemberian pinjaman kepada perusahaan negara/daerah, investasi dalam bentuk dana bergulir, penyertaan modal dalam proyek pembangunan, dan investasi non-permanen lainnya.

Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.

b) Pengakuan

Investasi jangka panjang diakui pada saat keluarnya sumber daya ekonomi BLUD untuk memperoleh investasi jangka panjang dan dapat diukur dengan andal.

c) Pengukuran

Investasi permanen dinilai berdasarkan biaya perolehan, kecuali jika harga pasar investasi jangka panjang menunjukkan penurunan nilai di bawah biaya perolehan secara signifikan dan permanen, perlu dilakukan penyesuaian atas nilai investasi tersebut. Penilaian dalam hal ini dilakukan untuk masing-masing investasi secara individual dan Investasi Non Permanen dinilai berdasarkan harga perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasikan.

d) Penyajian dan Pengungkapan

- a) Investasi jangka panjang disajikan dalam kelompok aset tidak lancar pada neraca.
- b) Pengungkapan pada catatan atas laporan keuangan adalah untuk hal-hal sebagai berikut :
 - i. rincian jenis dan jumlah penempatan dana;
 - ii. kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai tercatat dari investasi;
 - iii. pembatasan yang signifikan pada kemampuan realisasi investasi atau pengiriman uang dari penghasilan dan hasil pelepasan;

3. Aset Tetap

a. Pengertian

Aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam proses produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk disewakan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif; dan diharapkan untuk digunakan lebih dari satu tahun.

b. Pengakuan

- Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan dengan nilai minimal Rp500.000,-
- Biaya perolehan Aset tetap dapat diukur secara andal.
- Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
- Tidak Dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas atau diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat.

c. Pengukuran

- Aset tetap diukur berdasarkan biaya perolehan dan apabila penilaian Aset tetap dengan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai Aset tetap tersebut didasarkan pada nilai wajar oleh tim (apabila belum ada nilai dari Aset itu) pada saat perolehan.

- Kegiatan pengadaan yang menghasilkan satu aset tetap biaya perolehan terdiri dari realisasi belanja modal dan belanja non modal (belanja pegawai dan belanja barang dan jasa).
- Aset tetap yang diterima dari pihak ketiga pengkuan dan pencatatannya dilakukan setelah diterima berita acara penyerahan hak kepemilikan aset tersebut.
- Nilai aset tetap pada neraca adalah nilai yang telah direkonsiliasi di internal SKPD antara pengurus barang dengan PPK-SKPD dan telah direkonsiliasi dengan BPKAD bagian aset selaku Pembantu Pengelola Barang.

d. Metode Penyusutan

- Penyusutan adalah alokasi sistematis jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aset selama umur manfaatnya.
- Umur manfaat adalah periode suatu aset yang diharapkan dapat digunakan oleh entitasnya.
- Penyusutan dimulai pada saat aset tersebut siap untuk digunakan misalnya aset tersebut berada pada lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai dengan intensi manajemen.
- Penyusutan Aset Tetap menggunakan metode garis lurus dikurangi Nilai Residu, Nilai Residu Rp.0,-.
- Daftar jenis, masa manfaat dan Penambahan Masa Manfaat seperti dalam lampiran dalam Bab Ini.

Keterangan :

1. Gedung dan Bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang dibangun atau dibeli dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional dan dalam kondisi siap digunakan.
2. Peralatan dan mesin yang masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dengan nilai perolehan minimal atau sama dengan Rp. 500.000 dan dalam kondisi siap digunakan, mencakup :
 - a. Peralatan dan perlengkapan kantor seperti peralatan kantor, perlengkapan kantor, komputer, meubeler, dan peralatan dan perlengkapan kantor lainnya.
 - b. Peralatan dan perlengkapan rumah tangga seperti alat angkut, alat bengkel, alat dapur, Penghias ruang rumah tangga, alat studio dan alat komunikasi, dan peralatan dan perlengkapan RT lainnya.
 - c. Peralatan kedokteran meliputi peralatan kedokteran dan peralatan kedokteran lainnya.
 - d. Peralatan laboratorium meliputi peralatan laboratorium Klinik dan Anatomi

3. Jalan, Jaringan dan Instalasi meliputi jaringan irigasi, Instalasi listrik, dan Instalasi telepon.
 4. Aset tetap mencakup Aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan Aset tetap diatas meliputi koleksi buku / perpustakaan dan barang bercorak kesenian dan budaya.
- e. Penyajian dan Pengungkapan
- (1) Aset tetap disajikan pada pos aset non lancar pada neraca.
 - (2) Aset tetap disajikan berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan disajikan secara terpisah dari aset tetap.
 - (3) Nilai buku aset tetap disajikan di neraca dengan mengurangi harga perolehan dengan akumulasi penyusutan.
 - (4) Aset yang diperoleh dengan cara sewa guna usaha (*leasing*) disajikan sebagai bagian aset tetap dalam kelompok tersendiri.
 - (5) Hal-hal yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan adalah:
 - i. dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan jumlah tercatat bruto. Jika lebih dari satu dasar yang digunakan, jumlah tercatat bruto untuk dasar dalam setiap kategori harus diungkapkan;
 - ii. metode penyusutan yang digunakan;
 - iii. masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
 - iv. jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode;
 - v. nilai tercatat pada awal dan akhir periode yang memperlihatkan:
 - a) penambahan;
 - b) pelepasan;
 - c) revaluasi yang dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah;
 - d) penurunan nilai tercatat;
 - e) penyusutan;
 - f) setiap pengklasifikasian kembali.
 - vi. eksistensi dan batasan atas hak milik, dan aset tetap yang dijaminkan untuk utang;
 - vii. kebijakan akuntansi untuk biaya perbaikan yang berkaitan dengan aset tetap;
 - viii. uraian rincian dari masing-masing aset tetap;
 - ix. jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.

4. Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Aset lainnya antara lain tagihan jangka panjang, kemitraan dengan pihak ketiga, aset tak berwujud, dan aset lain-lain.

Ruang lingkup yang diatur pada bagian ini tagihan jangka panjang, kemitraan dengan pihak ketiga, aset tak berwujud, dan aset lain-lain yang berasal dari penghentian penggunaan aktif aset tetap pemerintah.

Metode penyusutan Aset lainnya dengan amortisasi untuk aset tak berwujud dan akumulasi penyusutan untuk barang rusak berat. Beban penyusutan/beban amortisasi merupakan alokasi penyusutan yang akan dilaporkan dalam Laporan Operasional entitas. Seperti layaknya beban lainnya, beban penyusutan/beban amortisasi merupakan akun nominal yang pada akhir periode harus ditutup sehingga saldonya nol di setiap awal periode. Sedangkan akumulasi penyusutan dan amortisasi akan dilaporkan dalam neraca. Akumulasi penyusutan dan amortisasi merupakan akun nominal sehingga angkanya tidak akan pernah ditutup di akhir tahun.

Akumulasi penyusutan dan amortisasi merupakan total dari penyusutan suatu aset tetap/aset tidak berwujud yang telah dibebankan. Akumulasi penyusutan dan amortisasi menjadi pengurang aset tetap/aset tidak berwujud dalam neraca dimana harga perolehan aset tetap/aset tidak berwujud yang telah dikurangi dengan akumulasi penyusutannya dan amortisasinya menjadi nilai buku (book value) aset tetap/aset tidak berwujudnya tersebut.

4.3.4. Kewajiban

1. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul.
2. Kewajiban Perhitungan Pihak Ketiga (PPK) diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan nilai sekarang kas yang akan dibayarkan atau jumlah pembiayaan yang berupa penerimaan atau pembayaran kewajiban PPK yang telah diakui dalam periode berjalan.
3. Bagian Lancar Kewajiban Jangka Panjang diakui pada saat reklasifikasi dalam periode berjalan atau berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa pembayaran bagian lancar kewajiban jangka panjang yang telah diakui dalam periode berjalan.
4. Kewajiban dicatat sebesar jumlah yang diterima sebagai penukar dari kewajiban, atau nilai sekarang dari jumlah kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut.
5. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban yang diukur dalam mata uang asing dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi.

4.3.5. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Dalam Basis Akrua, pemerintah hanya menyajikan satu jenis pos ekuitas.

Saldo akhir ekuitas diperoleh dari perhitungan pada Laporan Perubahan Ekuitas. Ekuitas disajikan dalam Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, dan CaLK.

BAB 5
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran
5.1.1. Penjelasan Pos-pos Pendapatan

Pendapatan yang dimasukkan dalam Laporan Realisasi Anggaran adalah pendapatan yang diterima selama TA. 2016 dan sudah disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah. Penerimaan yang sudah diterima oleh Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu tetapi sampai dengan tutup tahun anggaran belum disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah tidak ikut diperhitungkan dalam penerimaan pendapatan Tahun Anggaran 2016.

5.1.1.1. Pendapatan Daerah

Total realisasi Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp306.062.018.872 atau 105,54% dari target Rp290.000.000.000 dan untuk Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp277.398.611.860 dengan rincian sebagai berikut :

	2016		%	Realisasi 2015
	Anggaran	Realisasi		
Pendapatan Asli daerah	-			
Pendapatan Transfer				
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah	290.000.000.000,00	306.062.018.872,00	105,54%	277.398.611.860,00
Jumlah	290.000.000.000,00	306.062.018.872,00	105,54%	277.398.611.860,00

5.1.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah

Total realisasi Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp306.062.018.872 atau 105,54% dari target Rp290.000.000.000 dan untuk Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp277.398.611.860 dengan rincian sebagai berikut :

	2016		%	Realisasi 2015
	Anggaran	Realisasi		
Pendapatan Asli daerah				
Pendapatan Transfer				
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah	290.000.000.000,00	306.062.018.872,00	105,54%	277.398.611.860,00
Jumlah	290.000.000.000,00	306.062.018.872,00	105,54%	277.398.611.860,00

5.1.1.1.1.1. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Total realisasi Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp306.062.018.872 atau 105,54% dari target Rp290.000.000.000 dan untuk Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp277.398.611.860 dengan rincian sebagai berikut :

	2016		%	Realisasi 2015
	Anggaran	Realisasi		
Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan				
Tuntutan Ganti Rugi				
Pendapatan Denda keterlambatan				
Pendapatan Denda Pajak				
Pendapatan Denda Retribusi				
Pendapatan Denda atas Pelanggaran Perda				
Pendapatan dari Pengembalian Penerimaan Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum	-	-	-	19.980.000,00
Penerimaan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan				
Penerimaan dari BLUD	290.000.000.000,00	306.062.018.872,00	105,54%	277.378.631.860,00
Penerimaan Lain-Lain				
Jumlah	290.000.000.000,00	306.062.018.872,00	105,54%	277.398.611.860,00

Total realisasi Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp306.062.018.872 dengan rincian pendapatan BLUD sebagai berikut :

	2016		%	Realisasi 2015
	Anggaran	Realisasi		
Pendapatan dari Pengembalian				19.980.000
Pendapatan BLUD :				
1. Pendapatan Pelayanan Kesehatan / Operasional	281.000.000.000	295.150.337.012	105,04%	266.648.979.156
2. Pembayaran Non Instalasi	1.900.000.000	1.319.110.000	69,43%	1.243.797.000
3. Pendapatan Lainnya	7.100.000.000	9.592.571.860	135,11%	9.485.855.704
Jumlah	290.000.000.000,00	306.062.018.872,00	105,54%	277.398.611.860,00

5.1.2. PENJELASAN POS-POS BELANJA

Belanja yang dimasukan dalam Laporan Realisasi Anggaran adalah realisasi belanja berdasarkan SPJ belanja bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2016.

5.1.2.1. Belanja Operasi

Realisasi Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp351.433.818.453 atau 79,97% dari anggaran Rp439.463.347.000 dan untuk Tahun Anggaran 2015sebesar Rp333.069.754.850 dengan rincian sebagai berikut :

	2016		%	Realisasi 2015
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Pegawai	139.113.951.000	116.437.158.518	83,70%	117.405.297.558,00
Belanja Barang & Jasa	300.349.396.000	234.996.659.935	78,24%	215.664.457.292,00
Jumlah	439.463.347.000,00	351.433.818.453,00	79,97%	333.069.754.850,00

5.1.2.1.1. Belanja Pegawai

Realisasi Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp116.437.158.518 atau 83,70% dari anggaran Rp139.113.951.000 dan untuk Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp117.405.297.558 dengan rincian sebagai berikut :

	2016		%	Realisasi 2015
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Pegawai Tidak Langsung	110.613.951.000	91.705.085.996	82,91%	96.666.264.938,00
Belanja Pegawai langsung	28.500.000.000	24.732.072.522	86,78%	20.739.032.620,00
Jumlah	139.113.951.000,00	116.437.158.518,00	83,70%	117.405.297.558,00

5.1.2.1.2. Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp234.996.659.935 atau 78.24% dari anggaran Rp300.349.396.000 dan untuk Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp215.664.457.292 dengan rincian sebagai berikut :

	2016		%	Realisasi 2015
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Bahan Pakai Habis				11.969.000,00
Belanja Bahan/Material	4.153.420.000	4.137.278.699	99,61%	21.794.093.952
Belanja Jasa Kantor	1.960.622.000	1.934.394.556	98,66%	-
Belanja Premi Asuransi				
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor				
Belanja Cetak dan Penggandaan				11.092.770
Belanja Sewa Rumah/ Gedung /Gudang/ Parkir				
Belanja Sewa Sarana Mobilitas				
Belanja Sewa Alat Berat				

	2016		%	Realisasi 2015
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor				
Belanja Makanan dan Minuman	-	-	-	14.985.000
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya				
Belanja Pakaian Kerja				
Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu				
Belanja Perjalanan Dinas				
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS				
Belanja Kursus Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS				
Belanja Pemeliharaan				
Belanja Jasa Konsultasi				
Belanja Barang & Jasa BLUD	294.235.354.000	228.924.986.680	77,80%	193.832.316.570
Belanja Hibah Barang & Jasa Berkenaan Kepada Pihak Ketiga/ Masyarakat				
Uang untuk dihibahkan kepada pihak ketiga/masyarakat				
Jumlah	300.349.396.000,00	234.996.659.935,00	78,24%	215.664.457.292,00

5.1.2.2. Belanja Modal

Realisasi Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp63.113.793.647 atau 87,37% dari anggaran Rp72.237.744.000 dan untuk Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp124.121.786.623 dengan rincian sebagai berikut :

	2016		%	Realisasi 2015
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Tanah	-	-	-	-
Belanja Peralatan dan Mesin	66.417.744.000,00	59.687.970.812,00	89,87%	89.153.447.493,00
Belanja Gedung dan Bangunan	4.050.000.000,00	3.405.858.000,00	84,10%	33.005.156.320,00
Belanja Jalan, Jembatan, irigasi dan Jaringan	1.750.000.000,00	-	0,00%	1.899.435.575,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	20.000.000,00	19.964.835,00	99,82%	63.747.235,00
Jumlah	72.237.744.000,00	63.113.793.647,00	87,37%	124.121.786.623,00

5.1.2.2.1. Belanja Modal Tanah

Realisasi Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp0 atau 0,00% dari anggaran Rp0 dan untuk Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp0 dengan rincian sebagai berikut :

	2016		%	Realisasi 2015
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Tanah	-	-	-	-
Jumlah	-	-	-	-

5.1.2.2.2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp59.687.970.812 atau 89,87% dari anggaran Rp66.417.744.000 dan untuk Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp89.153.447.493 dengan rincian sebagai berikut :

	2016		%	Realisasi 2015
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Alat-alat Berat	-	-	-	4.694.781.000
Belanja Alat-alat Angkut	1.062.500.000	1.062.500.000	100,00%	654.890.002
Belanja Alat-alat Bengkel	290.800.000	252.480.200	86,82%	-
Belanja Alat-alat Pertanian	-	-	-	-
Belanja Alat-alat Kantor dan rumah Tangga	4.884.954.000	4.099.015.712	83,91%	9.385.118.270

	2016		%	Realisasi 2015
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Alat-alat Studio	-	-	-	-
Belanja Alat-alat Kedokteran	60.179.490.000	54.273.974.900	90,19%	74.418.658.221
Belanja Alat-alat Laboratorium	-	-	-	-
Belanja Alat-alat Keamanan	-	-	-	-
Jumlah	66.417.744.000,00	59.687.970.812,00	89,87%	89.153.447.493,00

5.1.2.2.3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp3.405.858.000 atau 84,10% dari anggaran Rp4.050.000.000 dan untuk Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp33.005.156.320 dengan rincian sebagai berikut :

	2016		%	Realisasi 2015
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Gedung	4.050.000.000	3.405.858.000	84,10%	33.005.156.320
Belanja Monumen	-	-	-	-
Jumlah	4.050.000.000,00	3.405.858.000,00	84,10%	33.005.156.320,00

5.1.2.2.4. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari anggaran Rp1.750.000.000 dan untuk Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp1.899.435.575 dengan rincian sebagai berikut :

	2016		%	Realisasi 2015
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Jalan dan Jembatan	-	-	-	-
Belanja Bangunan Air (Irigasi)	-	-	-	-
Belanja Instalansi dan Jaringan	1.750.000.000	-	-	1.899.435.575
Jumlah	1.750.000.000,00	-	-	1.899.435.575,00

5.1.2.2.5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Realisasi Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp19.964.835 atau 99,82% dari anggaran Rp20.000.000 dan untuk Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp63.747.235 dengan rincian sebagai berikut :

	2016		%	Realisasi 2015
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Buku Perpustakaan	20.000.000	19.964.835	99,82%	12.247.235
Belanja Barang Bercorak Kesenian, Kebur	-	-	-	51.500.000
Belanja Hewan, Ternak dan Tanaman	-	-	-	-
Jumlah	20.000.000,00	19.964.835,00	99,82%	63.747.235,00

5.1.2.2.6. Belanja Modal BLUD

Realisasi Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp28.452.331.179 atau 76,55% dari anggaran Rp37.170.000.000 dan untuk Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp69.249.313.020 dengan rincian sebagai berikut :

	2016		%	Realisasi 2015
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Tanah	-	-	-	-
Belanja Peralatan dan Mesin	31.350.000.000,00	25.026.508.344,00	79,83%	61.452.228.390,00
Belanja Gedung dan Bangunan	4.050.000.000	3.405.858.000	84,10%	5.885.401.820
Belanja Jalan, Jembatan, irigasi dan Jaringan	1.750.000.000,00	-	0,00%	1.899.435.575,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	20.000.000,00	19.964.835,00	99,82%	12.247.235,00
Jumlah	37.170.000.000,00	28.452.331.179,00	76,55%	69.249.313.020,00

5.1.2.2.6.1. Belanja Modal BLUD Tanah

Realisasi Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp0 atau 0,00% dari anggaran Rp0 dan untuk Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp0 dengan rincian sebagai berikut :

	2016		%	Realisasi 2015
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Tanah	-	-	-	-
Jumlah	-	-	-	-

5.1.2.2.6.2. Belanja Modal BLUD Peralatan dan Mesin

Realisasi Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp25.026.508.344 atau 79,83% dari anggaran Rp31.350.000.000 dan untuk Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp61.452.228.390 dengan rincian sebagai berikut :

	2016		%	Realisasi 2015
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Alat-alat Berat	-	-	-	4.694.781.000
Belanja Alat-alat Angkut	-	-	-	-
Belanja Alat-alat Bengkel	290.800.000	252.480.200	86,82%	1.196.916.000
Belanja Alat-alat Pertanian	-	-	-	2.773.096.100
Belanja Alat-alat Kantor dan rumah Tangga	4.884.954.000	4.099.015.712	83,91%	4.381.461.500
Belanja Alat-alat Studio	-	-	-	1.033.644.670
Belanja Alat-alat Kedokteran	26.174.246.000	20.675.012.432	78,99%	-
Belanja Alat-alat Laboratorium	-	-	-	41.486.927.300
Belanja Alat-alat Keamanan	-	-	-	5.885.401.820
Jumlah	31.350.000.000,00	25.026.508.344,00	79,83%	61.452.228.390,00

5.1.2.2.6.3. Belanja Modal BLUD Gedung dan Bangunan

Realisasi Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp3.405.858 atau 84,10% dari anggaran Rp4.050.000.000 dan untuk Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp5.885.401.520 dengan rincian sebagai berikut :

	2016		%	Realisasi 2015
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Gedung	4.050.000.000	3.405.858.000	84,10%	5.885.401.820,00
Belanja Monumen	-	-	0,00%	-
Jumlah	4.050.000.000	3.405.858.000	84,10%	5.885.401.820,00

5.1.2.2.6.4. Belanja Modal BLUD Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari anggaran Rp1.750.000.000 dan untuk Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp1.899.435.575 dengan rincian sebagai berikut :

	2016		%	Realisasi 2015
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Jalan dan Jembatan	-	-	-	-
Belanja Bangunan Air (Irigasi)	-	-	-	-
Belanja Instalansi dan Jaringan	1.750.000.000	-	-	1.899.435.575
Jumlah	1.750.000.000,00	-	-	1.899.435.575,00

5.1.2.2.6.5. Belanja Modal BLUD Aset Tetap Lainnya

Realisasi Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp19.964.835 atau 99,82% dari anggaran Rp20.000.000 dan untuk Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp12.247.235 dengan rincian sebagai berikut :

	2016		%	Realisasi 2015
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Buku Perpustakaan	20.000.000	19.964.835	99,82%	12.247.235
Belanja Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan	-			-
Belanja Hewan, Ternak dan Tanaman	-			-
Jumlah	20.000.000,00	19.964.835,00	99,82%	12.247.235,00

5.1.3. SISA LEBIH PEMBIYAAAN ANGGARAN (SiLPA)

SiLPA Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp(108.485.593.228), sedangkan Tahun 2015 sebesar Rp(179.792.929.613).

5.2. PENJELASAN POS-POS NERACA

5.2.1. Aset

Total Aset per 31 Desember 2016 sebesar Rp565.690.725.270,26 turun sebesar Rp4.701.473.338,53 atau 0,82% dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp570.392.198.608,79 dengan rincian sebagai berikut :

Aset	2016	2015
1. Aset Lancar	148.881.305.790,44	159.181.948.228,32
2. Aset Tetap	416.809.419.479,82	411.210.250.380,47
3. Aset Lainnya	-	-
Jumlah	565.690.725.270,26	570.392.198.608,79

5.2.1.1. Aset Lancar

Aset Lancar per 31 Desember 2016 sebesar Rp148.881.305.790,44 turun sebesar Rp10.300.642.437,88 atau 6,47% dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp159.181.948.228,32 dengan rincian sebagai berikut :

Aset Lancar	2016	2015
1. Kas	96.226.936.898,68	70.163.339.957,66
2. Piutang	25.092.259.807,59	54.902.224.332,18
3. Belanja Dibayar dimuka	350.009.083,33	356.932.166,67
4. Persediaan	27.212.100.000,84	33.759.451.771,81
Jumlah	148.881.305.790,44	159.181.948.228,32

5.2.1.1.1. Kas

Aset Lancar per 31 Desember 2016 sebesar Rp96.226.936.898,68 naik sebesar Rp26.063.596.941,02 atau 37,15% dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp70.163.339.957,66 dengan rincian sebagai berikut :

	2016	2015
Kas di Bendahara Pengeluaran APBD	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	2.368.954.899,68	257.986.449,68
Kas BLUD	32.357.981.999,00	14.905.353.507,98
Setara Kas / Deposito	61.500.000.000,00	55.000.000.000,00
Jumlah	96.226.936.898,68	70.163.339.957,66

5.2.1.1.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

a. Kas di Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor

Kas di Bendahara Pengeluaran yang belum disetor merupakan sisa uang persediaan pada bendahara pengeluaran yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 belum disetor ke rekening kas daerah dan merupakan bagian dari SiLPA Tahun 2016.

No	Uraian	2016	2015
1	Rek. 1.003.00163.2 (Bend. Peng. APBD)	-	-
	Jumlah	-	-

5.2.1.1.1.2. Kas di Bendahara Penerimaan

a. Kas di Bendahara Penerimaan - BLUD

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan saldo kas pada Bendahara Penerimaan BLUD dari uang titipan pasien dan pendapatan yang belum disetor ke rekening BLUD per 31 Desember 2016.

No	Uraian	2016	2015
1	Rek. Bank Jateng No: 3.00.22300.7 (Bend. Penerimaan)	-	-
2	Rek. Bank Mandiri No: 1390015292281 (EDC)	414.916,68	15.369.466,68
3	Rek. Bank Jateng No. 2-003-15068-0 (Bend. Penerimaan Uang Muka)	2.368.539.983,00	242.616.983,00
	Jumlah	2.368.954.899,68	257.986.449,68

5.2.1.1.1.3. Kas BLUD

Kas BLUD adalah saldo kas tunai maupun yang ada di rekening bank yang merupakan selisih antara penerimaan dan pengeluaran BLUD tidak termasuk dana yang berasal dari APBD. Dan bagian dari SiLPA yang akan digunakan untuk operasional RSUD Prof. dr. Margono Soekarjo dan tidak disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah.

No	Uraian	2016	2015
1	Rek Bank Jateng No: 1.003.00163.2	32.003.832.332,00	14.659.067.971,00
2	Tunai Di Bendahara Pengeluaran	229.629.359,00	50.416.723,98
3	Tunai Di Bendahara Penerimaan	124.520.308,00	195.868.813,00
4	Deposito		
	Jumlah	32.357.981.999,00	14.905.353.507,98

5.2.1.1.2. Setara Kas

5.2.1.1.2.1. Deposito BLUD

Deposito BLUD merupakan bagian dari SiLPA. Rekening ini penempatan deposito berjangka waktu satu sampai tiga bulan. Deposito BLUD per 31 Desember 2016 sebesar Rp61.500.000.000 naik/turun sebesar Rp6.500.000.000 atau 10,57% dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp55.000.000.000 dengan rincian sebagai berikut :

No	Bank	Nomor Bilyet	Tgl. Pembukaan Deposito	Bunga Deposito	Nilai
1	Bank Jateng	A135334	25/10/2016	6,25%	15.000.000.000,00
2	Bank Jateng	A135318	27/09/2016	6,25%	25.000.000.000,00
3	Bank BNI	453300666	01/07/2016	6,75%	15.000.000.000,00
4	Bank BNI	453297347	01/07/2016	6,75%	6.500.000.000,00
Jumlah					61.500.000.000,00

No	Uraian	2016	2015
1	Bank Jateng	40.000.000.000,00	30.000.000.000,00
2	Bank BNI	21.500.000.000,00	25.000.000.000,00
	Jumlah	61.500.000.000,00	55.000.000.000,00

5.2.1.1.3. Piutang

Piutang per 31 Desember 2016 sebesar Rp25.092.259.807,59 turun sebesar Rp29.809.964.524,59 atau 54,30% dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp54.902.224.332,18 dengan rincian sebagai berikut:

	2016	2015
Piutang Retribusi	-	-
Penyisihan Piutang Retribusi	-	-
Piutang Retribusi Netto	-	-
	2016	2015
Piutang Lainnya	27.949.070.241,22	57.209.808.598,84
Penyisihan Piutang Lainnya	(2.856.810.433,63)	(2.307.584.266,66)
Piutang Lainnya Netto	25.092.259.807,59	54.902.224.332,18

5.2.1.1.3.5. Piutang Lainnya

Piutang lainnya meliputi piutang pendapatan Pasien umum dan Jaminan/BPJS pada RSUD Prof. dr. Margono Soekarjo Purwokerto, piutang pemanfaatan GOR, piutang hasil penjualan aset kendaraan, piutang penjualan aset tetap peralatan yang tidak terpakai dan piutang tuntutan ganti rugi. Piutang Lainnya per 31 Desember 2016 sebesar Rp27.949.070.241,22 turun sebesar Rp29.260.738.357,62 atau 51,15% dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp57.209.808.598,84 dengan rincian sebagai berikut :

	2016	2015
Piutang Pasien Umum	5.452.386.981,91	5.299.744.462,31
Piutang Askes/Jaminan	22.373.861.341,50	51.764.173.725,57
Piutang jasa Kepelabuhan	-	-
Piutang pemanfaatan GOR Jatidiri	-	-
Piutang Hasil Penjualan Aset	-	-
Piutang TGR	-	-
Piutang Bunga Deposito	122.821.917,81	145.890.410,96
Piutang Lain-Lain pada RSUD/RSJD	-	-
Piutang Lainnya Netto	27.949.070.241,22	57.209.808.598,84

Catatan Atas Piutang lainnya :

- Piutang lainnya dengan penjamin di catat berdasarkan tanggal pengajuan klaim ke pihak penjamin seperti BPJS atau BUMN.
- Piutang lainnya dengan penjamin BPJS yang belum diajukan di tahun 2016 Rp39.323.954.911,00 akan diajukan di tahun 2017.

5.2.1.1.3.6. Penyisihan Piutang Lainnya

Penyisihan piutang tidak tertagih merupakan piutang yang dikelola oleh RSUD Prof. dr. Margono Soekarjo Purwokerto dan dimungkinkan tidak dapat tertagih per 31 Desember 2016. Penyisihan Piutang Pajak per 31 Desember 2016 sebesar Rp2.856.810.433,63 naik sebesar Rp549.226.166,97 atau 0,96% dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar 2.307.584.266,66 dengan rincian sebagai berikut:

	2016		2015	
	Piutang	Cadangan	Piutang	Cadangan
- lancar	23.242.255.747,31	116.211.278,74	52.917.250.149,66	264.586.250,74
- menunggak 1-2 tahun	761.782.023,91	76.178.202,39	947.475.984,18	94.747.598,42
- menunggak 2-3 tahun	2.561.223.035,00	1.280.611.517,50	1.466.013.280,00	733.006.640,00
- menunggak 3-5 tahun	-	-	1.327.650.815,00	663.825.407,50
- menunggak lebih dari 5 tahun	1.383.809.435,00	1.383.809.435,00	551.418.370,00	551.418.370,00
Jumlah	27.949.070.241,22	2.856.810.433,63	57.209.808.598,84	2.307.584.266,66

5.2.1.1.4. Belanja Dibayar Dimuka

Belanja dibayar dimuka merupakan belanja yang belum menjadi kewajiban RSUD Prof. dr. Margono Soekarjo Purwokerto untuk membayar pada Tahun 2016 namun RSUD Prof. dr. Margono Soekarjo Purwokerto telah melakukan pembayaran pada Tahun 2016 sehingga pembayaran tersebut sebagai uang muka. Belanja dibayar dimuka tersebut berupa Asuransi Barang Milik Daerah dan Asuransi Pegawai. Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2016 sebesar Rp350.009.083,33 turun sebesar Rp6.923.088,33 atau 1,94% dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp356.932.166,67 dengan rincian sebagai berikut :

	2016	2015
Asuransi BMD	245.404.417	246.554.166,67
Asuransi Pegawai	104.604.667	110.378.000,00
Sewa	-	-
Jumlah	350.009.083,33	356.932.166,67

5.2.1.1.5. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional RSUD Prof. dr. Margono Soekarjo Purwokerto, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Nilai persediaan diperoleh dari hasil perhitungan fisik per 31 Desember 2016, dikalikan dengan harga pembelian terakhir. Persediaan per 31 Desember 2016 sebesar Rp27.212.100.000,84 turun sebesar Rp6.547.351.770,97 atau 19,39% dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp33.759.451.771,81 dengan rincian sebagai berikut :

	2016	2015
Persediaan Bahan Pakai Habis	3.609.802.608,00	3.076.713.287,00
Persediaan Bahan/Material	22.912.660.782,34	30.247.232.608,81
Persediaan Cetak	616.145.872,00	347.292.047,00
Persediaan Pakaian Dinas/Kerja	-	-
Persediaan Makanan dan Minuman	73.490.738,50	88.213.829,00
Persediaan Hibah	-	-
Jumlah	27.212.100.000,84	33.759.451.771,81

Catatan Atas Persediaan :

Selama tahun 2016 terdapat persediaan obat dan Alkes yang kadaluwarsa sebesar Rp63.404.287,40 saldo ini tidak termasuk didalam persediaan obat-obatan. Persediaan yang akan dimusnahkan ini dicatat terpisah dari pencatatan persediaan dalam gudang farmasi. Penempatan persediaan ini pun dilakukan di tempat khusus yang terpisah. Persetujuan pemusnahannya sedang dalam proses dan pencatatan Obat dan Alkes ini dicatat terpisah dari persediaan.

	2016	2015
1. Obat	35.066.791,40	223.770.793,50
2. Alkes	28.337.496,00	4.400.675,00
Jumlah	63.404.287,40	228.171.468,50

5.2.1.2. Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2016 sebesar Rp0. naik/turun sebesar Rp0 atau 0,00% dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp0.

5.2.1.3. Aset Tetap

Aset Tetap per 31 Desember 2016 sebesar Rp416.809.419.479,82 naik sebesar Rp5.599.169.099,35 atau 1,36% dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp411.210.250.380,47 dengan rincian sebagai berikut :

	2016	2015
1. Tanah	105.738.750.000,00	105.738.750.000,00
2. Peralatan dan Mesin	414.826.043.573,00	354.717.508.380,00
3. Gedung dan Bangunan	193.827.962.400,00	190.686.255.100,00
4. Jalan, Irigasi dan Jaringan	17.919.911.684,00	17.919.911.684,00
5. Aset Tetap Lainnya	310.814.996,00	290.850.161,00
6. Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-
7. Akumulasi Penyusutan	(315.814.063.173,18)	(258.143.024.944,53)
Jumlah	416.809.419.479,82	411.210.250.380,47

Rincian mutasi aset tetap terdiri dari :

Saldo Awal	669.353.275.325,00
Penambahan	
Belanja Modal	63.113.793.647,00
Belanja Barang/Jasa	-
Hibah	496.135.000,00
Mutasi Masuk	-
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	-
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya	-
Koreksi	8.950.000,00
Jumlah	732.972.153.972,00
Berkurang	
Ekstrakontable	84.520.619,00
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	-
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	264.150.700,00
Mutasi Keluar	-
Koreksi	-
Jumlah	348.671.319,00
Akumulasi Penyusutan	315.814.063.173,18
Grand Total	416.809.419.479,82

Mutasi bertambah adalah sebagai berikut :

- ✓ Belanja Modal adalah realisasi hasil pengadaan melalui belanja modal selama Tahun 2016.
- ✓ Belanja Barang/Jasa adalah kapitalisasi realisasi belanja barang/jasa yang dapat menambah nilai Aset Tetap selama Tahun 2016 sesuai Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2014 tentang Kebijakan dan Sistem
- ✓ Hibah adalah aset tetap yang diterima dari Instansi di luar Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- ✓ Mutasi Masuk adalah perpindahan aset antar SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah selama Tahun 2016.
- ✓ Reklasifikasi Masuk Aset Tetap adalah perpindahan sesama akun aset tetap karena penyesuaian jenis rekening aset tetap yang seharusnya.
- ✓ Reklasifikasi Masuk Aset Lainnya adalah perpindahan dari aset lainnya ke aset tetap karena penyesuaian jenis rekening aset tetap yang seharusnya.
- ✓ Koreksi/penilaian adalah salah catat atau penambahan nilai atas aset tetap.

Mutasi berkurang adalah sebagai berikut :

- ✓ Ekstrakomtable adalah aset tetap yang dikeluarkan dari Kartu Inventaris Barang atau kategori aset tetap dikarenakan nilai satuan aset tersebut dibawah nilai kapitalisasi aset tetap sesuai Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2014 tentang Kebijakan dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.
- ✓ Reklasifikasi Keluar Aset Tetap adalah perpindahan sesama akun aset tetap karena penyesuaian jenis rekening aset tetap yang seharusnya.
- ✓ Reklasifikasi Kurang Aset Lainnya adalah perpindahan dari aset tetap ke aset lainnya karena dikategorikan sebagai barang rusak berat, aset dikerjasamakan dan Aset Tak Berwujud.
- ✓ Hibah adalah aset yang diberikan kepada Instansi di luar Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- ✓ Mutasi keluar adalah perpindahan aset tetap antar SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah selama Tahun 2016.
- ✓ Koreksi adalah salah catat atau pengurangan nilai atas aset tetap.

5.2.1.3.1. Tanah

Aset Tetap per 31 Desember 2016 sebesar Rp105.738.750.000 naik/turun sebesar Rp0 atau 0,00% dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp105.738.750.000 dengan rincian sebagai berikut :

	2016	Bertambah	Berkurang	2015
Tanah	105.738.750.000,00	-	-	105.738.750.000,00
Jumlah	105.738.750.000,00	-	-	105.738.750.000,00

Rincian mutasi tanah terdiri dari :

Saldo Awal	105.738.750.000,00
Penambahan	
Belanja Modal	-
Belanja Barang/Jasa	-
Hibah	-
Mutasi Masuk	-
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	-
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya	-
Koreksi	-
Jumlah	105.738.750.000,00
Berkurang	
Ekstrakontable	-
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	-
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	-
Mutasi Keluar	-
Koreksi	-
Jumlah	-
Grand Total	105.738.750.000,00

5.2.1.3.2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2016 sebesar Rp414.826.043.573 naik sebesar Rp60.108.535.193 atau 16,95% dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp354.717.508.380 dengan rincian sebagai berikut :

	2016	Bertambah	Berkurang	2015
Alat Berat	20.409.450.483,00	-	-	20.409.450.483,00
Alat Angkut	6.224.646.963,00	1.554.570.000,00	-	4.670.076.963,00
Alat Bengkel dan Ukur	2.503.146.200,00	252.480.200,00	-	2.250.666.000,00
Alat Pertanian dan Peternakan	26.410.500,00	-	-	26.410.500,00
Alat Kantor dan Rumah Tangga	46.346.109.623,00	4.112.030.712,00	14.388.200,00	42.248.467.111,00
Alat Studio dan Komunikasi	648.602.249,00	-	-	648.602.249,00

	2016	Bertambah	Berkurang	2015
Alat Kedokteran	336.370.618.689,00	54.273.974.900,00	70.132.419,00	282.166.776.208,00
Alat Laboratorium	2.297.058.866,00	-	-	2.297.058.866,00
Alat Keamanan	-	-	-	-
Jumlah	414.826.043.573,00	60.193.055.812,00	84.520.619,00	354.717.508.380,00

Rincian mutasi peralatan dan mesin terdiri dari :

Saldo Awal	354.717.508.380,00
Penambahan	
Belanja Modal	59.687.970.812,00
Belanja Barang/Jasa	-
Hibah	496.135.000,00
Mutasi Masuk	-
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	-
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya	-
Koreksi	8.950.000,00
Jumlah	60.193.055.812
Berkurang	
Ekstrakontable	84.520.619,00
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	-
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	-
Mutasi Keluar	-
Koreksi	-
Jumlah	84.520.619,00
Grand Total	414.826.043.573,00

5.2.1.3.3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2016 sebesar Rp193.827.962.400 naik sebesar Rp3.141.707.300 atau 1,65% dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp190.686.255.100 dengan rincian sebagai berikut :

	2016	Bertambah	Berkurang	2015
Gedung	193.309.762.400,00	3.405.858.000,00	264.150.700,00	190.168.055.100,00
Monumen	518.200.000,00	-	-	518.200.000,00
Jumlah	193.827.962.400,00	3.405.858.000,00	264.150.700,00	190.686.255.100,00

Rincian mutasi Gedung dan Bangunan terdiri dari :

Saldo Awal	190.686.255.100,00
Penambahan	
Belanja Modal	3.405.858.000,00
Belanja Barang/Jasa	-
Hibah	-
Mutasi Masuk	-
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	-
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya	-
Koreksi	-
Jumlah	3.405.858.000,00
Berkurang	
Ekstrakontable	-
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	-
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	264.150.700,00
Mutasi Keluar	-
Koreksi	-
Jumlah	264.150.700,00
Grand Total	193.827.962.400,00

5.2.1.3.4. Jalan, irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan jaringan per 31 Desember 2016 sebesar Rp17.919.911.684 naik/turun sebesar Rp0 atau 0,00% dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp17.919.911.684 dengan rincian sebagai berikut :

	2016	Bertambah	Berkurang	2015
Jalan dan Jembatan	-	-	-	-
Bangunan Air/Irigasi	175.000.000,00	-	-	175.000.000,00
Instalasi	15.520.702.735,00	-	-	15.520.702.735,00
Jaringan	2.224.208.949,00	-	-	2.224.208.949,00
Jumlah	17.919.911.684,00	-	-	17.919.911.684,00

Rincian mutasi Jalan, Irigasi dan jaringan terdiri dari :

Saldo Awal	17.919.911.684,00
Penambahan	
Belanja Modal	-
Belanja Barang/Jasa	-
Hibah	-
Mutasi Masuk	-
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	-
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya	-
Koreksi	-
Jumlah	-
Berkurang	
Ekstrakontable	-
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	-
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	-
Mutasi Keluar	-
Koreksi	-
Jumlah	-
Grand Total	17.919.911.684,00

5.2.1.3.5. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2016 sebesar Rp310.814.996 naik sebesar Rp19.964.835 atau 6,86% dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp290.850.161 dengan rincian sebagai berikut :

	2016	Bertambah	Berkurang	2015
Buku Perpustakaan	291.614.996,00	19.964.835,00	-	271.650.161,00
Barang Bercorak Kesenian dan Kebudayaan	19.200.000,00	-	-	19.200.000,00
Hewan, Ternak dan Tanaman	-	-	-	-
Jumlah	310.814.996,00	19.964.835,00	-	290.850.161,00

Rincian mutasi Aset Tetap Lainnya terdiri dari :

Saldo Awal	290.850.161,00
Penambahan	
Belanja Modal	19.964.835,00
Belanja Barang/Jasa	-
Hibah	-
Mutasi Masuk	-
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	-
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya	-
Koreksi	-
Jumlah	19.964.835,00

Berkurang	
Ekstrakontable	-
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	-
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	-
Mutasi Keluar	-
Koreksi	-
Jumlah	-
Grand Total	310.814.996,00

5.2.1.3.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam Pengerjaan per 31 Desember 2016 sebesar Rp0 naik/turun sebesar Rp0 atau 0,00% dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp0 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian pembangunan	2016	Bertambah	Berkurang	2015
Jumlah	-	-	-	-

Rincian mutasi Konstruksi dalam Pengerjaan terdiri dari :

Saldo Awal	
Penambahan	
Belanja Modal	-
Belanja Barang/Jasa	-
Hibah	-
Mutasi Masuk	-
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	-
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya	-
Koreksi	-
Jumlah	-
Berkurang	
Ekstrakontable	-
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	-
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	-
Mutasi Keluar	-
Koreksi	-
Jumlah	-
Grand Total	-

5.2.1.4. Akumulasi Penyusutan

Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2016 sebesar Rp315.814.063.173,18 naik sebesar Rp57.671.038.228,65 atau 22,34% dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp258.143.024.944,53 dengan rincian sebagai berikut :

	2016	2015
Akumulasi Penyusutan peralatan dan mesin	(277.062.126.422,66)	(223.715.402.679,91)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(36.154.576.718,90)	(32.359.384.812,71)
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	(2.597.360.031,62)	(2.068.237.451,91)
Jumlah	(315.814.063.173,18)	(258.143.024.944,53)

5.2.1.4.1. Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin

Akumulasi Penyusutan peralatan dan mesin per 31 Desember 2016 sebesar Rp277.062.126.422,66 naik sebesar Rp53.346.723.742,75 atau 23,85% dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp223.715.402.679,91 dengan rincian sebagai berikut :

	2016	2015
Alat Besar	(10.574.349.930,76)	(8.349.655.664,00)
Alat Angkut	(3.174.537.249,00)	(2.544.518.369,01)
Alat Bengkel	(2.170.036.040,20)	(2.079.414.000,20)
Alat Pertanian	(26.410.500,00)	(26.410.500,00)
Alat Kantor dan Rumah Tangga	(33.979.966.084,90)	(27.858.970.122,50)
Alat Studio dan Komunikasi	(631.313.329,00)	(615.329.889,00)
Alat Kedokteran	(224.305.494.422,80)	(180.053.225.269,20)
Alat Laboratorium	(2.200.018.866,00)	(2.187.878.866,00)
Alat Keamanan	-	-
Jumlah	(277.062.126.422,66)	(223.715.402.679,91)

5.2.1.4.2. Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan

Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2016 sebesar Rp36.154.576.718,90 naik sebesar Rp3.795.191.906,19 atau 11,73% dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp32.359.384.812,71 dengan rincian sebagai berikut :

	2016	2015
Gedung	(36.039.172.718,90)	(32.254.344.812,71)
Monumen	(115.404.000,00)	(105.040.000,00)
Jumlah	(36.154.576.718,90)	(32.359.384.812,71)

5.2.1.4.3. Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2016 sebesar Rp2.597.360.031,62 naik sebesar Rp529.122.579,71 atau 25,58% dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp2.068.237.451,91 dengan rincian sebagai berikut :

	2016	2015
Jalan dan Jembatan	-	-
Bangunan Air dan Irigasi	(175.000.000,00)	(175.000.000,00)
Instalasi	(2.290.755.083,00)	(1.819.944.171,80)
Jaringan	(131.604.948,62)	(73.293.280,11)
Jumlah	(2.597.360.031,62)	(2.068.237.451,91)

5.2.1.5. Aset Lainnya

Aset Lainnya per 31 Desember 2016 sebesar Rp0 naik/turun sebesar Rp0 atau 0,00% dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp0 dengan rincian sebagai berikut :

	2016	2015
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-
Akumulasi Kemitraan dengan Pihak Ketiga		
Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga Netto	-	-
	2016	2015
Aset Tak Berwujud	-	-
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	-	-
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud Netto	-	-

	2016	2015
Barang Rusak Berat	11.523.064.127,54	11.258.913.427,54
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(11.523.064.127,54)	(11.258.913.427,54)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya Netto	-	-
Jumlah Aset Lainnya	-	-

5.2.1.5.1. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Aset Lainnya per 31 Desember 2016 sebesar Rp0 naik/turun sebesar Rp0 atau 0,00% dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp0.

5.2.1.5.2. Aset Tidak Berwujud

Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2016 sebesar Rp0 naik/turun sebesar Rp0 atau 0,00% dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp0 dengan rincian sebagai berikut :

Aset Tak Berwujud	2016	2015
Software Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit	-	-
Jumlah	-	-

5.2.1.5.3. Amortisasi Aset Tak Berwujud

Amortisasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2016 sebesar Rp0 naik/turun sebesar Rp0 atau 0,00% dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp0 dengan rincian sebagai berikut :

	2016	2015
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	-	-
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud Netto	-	-

5.2.1.5.4. Barang Rusak Berat

Barang Rusak Berat per 31 Desember 2016 sebesar Rp11.523.064.127,54 naik sebesar RpRp264.150.700 atau 2,35% dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp11.258.913.427,54 merupakan barang rusak dan tidak digunakan untuk aktifitas operasional SKPD serta dalam proses penghapusan dengan rincian sebagai berikut :

	2016	2015
Alat Besar	166.928.570,00	166.928.570,00
Alat Angkut	-	-
Alat Bengkel	-	-
Alat Pertanian	-	-
Alat Kantor dan Rumah Tangga	156.812.605,60	156.812.605,60
Alat Studio dan Komunikasi	157.119.885,00	157.119.885,00
Alat Kedokteran	8.284.390.966,94	8.284.390.966,94
Alat Laboratorium	2.493.661.400,00	2.493.661.400,00
2016	2015	
Alat Keamanan	-	-
Gedung	264.150.700,00	-
Monumen	-	-
Jalan dan Jembatan	-	-
Bangunan Air dan Irigasi	-	-
Instalasi	-	-
Jaringan	-	-
Jumlah	11.523.064.127,54	11.258.913.427,54

5.2.1.5.5. Penyusutan Barang Rusak Berat

Penyusutan Barang Rusak Berat per 31 Desember 2016 sebesarRp(11.523.064.127,54) naik sebesar Rp264.150.700 atau 2,35% dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar (Rp11.258.913.427,54) dengan rincian sebagai berikut :

	2016	2015
Alat Besar	(166.928.570,00)	(166.928.570,00)
Alat Angkut	-	-
Alat Bengkel	-	-
Alat Pertanian	-	-
Alat Kantor dan Rumah Tangga	(156.812.605,60)	(156.812.605,60)
Alat Studio dan Komunikasi	(157.119.885,00)	(157.119.885,00)
Alat Kedokteran	(8.284.390.966,94)	(8.284.390.966,94)
Alat Laboratorium	(2.493.661.400,00)	(2.493.661.400,00)
Alat Keamanan	-	-
Gedung	(264.150.700,00)	
Monumen	-	-
Jalan dan Jembatan	-	-
Bangunan Air dan Irigasi	-	-
Instalasi	-	-
Jaringan		-
Jumlah	(11.523.064.127,54)	(11.258.913.427,54)

5.2.2. KEWAJIBAN

Total Kewajiban per 31 Desember 2016 Rp11.321.546.229,87 turun sebesar Rp434.423.983,13 atau 3,70% dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp11.755.970.213.

5.2.2.1. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2016 Rp11.321.546.229,87 turun sebesar Rp434.423.983,13 atau 3,70% dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp11.755.970.213 dengan rincian sebagai berikut :

	2016	2015
1 Utang Jangka Pendek Pihak Ketiga	-	-
2 Utang Perhitungan Pihak Ketiga	-	-
3 Pendapatan diterima Dimuka	75.000.000,00	105.000.000,00
4 Utang Belanja	2.777.093.756,00	3.075.333.693,00
5 Utang Jangka Pendek Lainnya	8.469.452.473,87	8.575.636.520,00
	-	-
Jumlah	11.321.546.229,87	11.755.970.213,00

5.2.2.1.1. Utang Jangka Pendek Pihak Ketiga

Kewajiban Jangka Pendek Pihak ketiga per 31 Desember 2016 sebesar Rp0 naik/turun sebesar Rp0 atau 0,00% dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp0 dengan rincian sebagai berikut :

	2016	2015
Utang Jangka Pendek Pihak Ketiga	-	-
Jumlah	-	-

5.2.2.1.2. Utang Perhitungan Fihak Ketiga

Kewajiban Jangka Pendek Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) per per 31 Desember 2016 sebesar Rp0 naik/turun sebesar Rp0 atau 0,00% dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp0 dengan rincian sebagai berikut :

	2016	2015
Utang Perhitungan Fihak Ketiga	-	-
Jumlah	-	-

5.2.2.1.3. Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2016 sebesar Rp75.000.000 turun sebesar Rp30.000.000 atau 28.57% dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp75.000.000 merupakan penerimaan yang sesungguhnya belum menjadi hak RSUD Prof. dr. Margono Soekarjo pada periode bersangkutan, tetapi pembayarannya telah terlebih dahulu diterima oleh RSUD Prof. dr. Margono Soekarjo pada Tahun 2016 dengan rincian sebagai berikut :

	2016	2015
Pendapatan Diterima Dimuka	75.000.000,00	105.000.000,00
Jumlah	75.000.000,00	105.000.000,00

5.2.2.1.4. Utang Belanja

Utang Belanja per 31 Desember 2016 sebesar Rp2.777.093.756 turun sebesar Rp298.239.937 atau 9,70% dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp3.075.333.693, utang belanja ini terdiri dari utang belanja TA. 2016 yang belum dibayarkan seperti utang gaji pegawai BLUD, telepon, listrik, air, internet, dan dari pihak ketiga dengan rincian sebagai berikut :

	2016	2015
Utang Belanja	2.777.093.756,00	3.075.333.693,00
Jumlah	2.777.093.756,00	3.075.333.693,00

5.2.2.1.5. Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2016 sebesar Rp8.469.452.473,87 turun sebesar Rp106.184.046,13 atau 1,24% dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp8.575.636.520 Utang ini berupa utang Jasa pelayanan Pada RSUD Prof. dr. Margono Soekarjo dengan rincian sebagai berikut :

	2016	2015
Utang Jangka Pendek Lainnya	8.469.452.473,87	8.575.636.520,00
Jumlah	8.469.452.473,87	8.575.636.520,00

5.2.3. EKUITAS

Total Ekuitas per 31 Desember 2016 sebesar Rp554.369.179.040,39 turun sebesar Rp4.267.049.355,39 atau 0,76% dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp558.636.228.395,79 dengan rincian sebagai berikut :

	2016	2015
Ekuitas Perubahan SAL	(14.627.611.229,00)	(109.887.576.105,02)
Pendapatan yang Ditangguhkan	2.368.954.899,68	257.986.449,68
Kas di Bendahara BLUD-hutang pihak ketiga (non SiLPA)	-	-
Cadangan Piutang	25.092.259.807,59	54.902.224.332,18
Cadangan Persediaan	27.212.100.000,84	33.759.451.771,81
Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	(11.246.546.229,87)	(11.650.970.213,00)
Diinvestasikan Dalam Investasi Jangka Panjang	-	-
Diinvestasikan dalam Aset Tetap	416.809.419.479,82	411.210.250.380,47
Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	-	-
Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang	-	-
Diinvestasikan dalam Dana Cadangan	-	-
Ekuitas Beban Dibayar Dimuka	350.009.083,33	356.932.166,67
Ekuitas Pendapatan Dibayar Dimuka	(75.000.000,00)	(105.000.000,00)
RK-PPKD KONSOLIDASIAN	108.485.593.228,00	179.792.929.613,00
Jumlah	554.369.179.040,39	558.636.228.395,79

5.3. PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

5.3.1. PENDAPATAN-LO

Pendapatan yang dimasukan dalam Laporan Operasional adalah pendapatan yang telah timbul hak pemerintah untuk menagih selama TA. 2016. Pendapatan-LO per 31 Desember 2016 sebesar Rp277.582.483.971,04 turun sebesar Rp15.616.546.224,61 atau 5,33% dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp293.199.030.195,65 dengan rincian sebagai berikut :

	2016	2015
Pendapatan Asli daerah	-	-
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah	277.086.348.971,04	293.182.547.195,65
Lain-Lain Pendapatan yang Sah	496.135.000,00	16.483.000,00
Jumlah	277.582.483.971,04	293.199.030.195,65

5.3.1.1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah-LO per 31 Desember 2016 sebesar Rp0 naik/turun sebesar Rp0 atau 0,00% dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp0, dengan rincian sebagai berikut :

	2016	2015
Pendapatan Pajak Daerah	-	-
Pendapatan Retribusi Daerah	-	-
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	-	-
Jumlah	-	-

5.3.1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah (DPPAD)

Pendapatan Pajak Daerah-LO per 31 Desember 2016 sebesar Rp0 naik/turun sebesar Rp0 atau 0,00% dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp0, dengan rincian sebagai berikut :

	2016	2015
Pajak Kendaraan Bermotor		
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor		
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor		
Pajak Air Permukaan		
Jumlah	-	-

5.3.1.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah

Pendapatan Retribusi Daerah-LO per 31 Desember 2016 sebesar Rp0 naik/turun sebesar Rp0 atau 0,00% dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp0, dengan rincian sebagai berikut :

	2016	2015
Retribusi Jasa Umum		
Retribusi Jasa Usaha		
Retribusi Perizinan Tertentu		
Jumlah	-	-

5.3.1.1.3. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Lain-Lain PAD yang Sah-LO per 31 Desember 2016 sebesar Rp277.086.348.971,04 turun sebesar Rp16.096.198.224,61 atau 5,49% dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp293.182.547.195,65 dengan rincian sebagai berikut :

	2016	2015
Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan		
Pendapatan Bunga		
Tuntutan Ganti Rugi		
Pendapatan Denda keterlambatan		
Pendapatan Denda Pajak		

	2016	2015
Pendapatan Denda Retribusi		
Pendapatan dari Pengembalian		
Penerimaan Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum		
Penerimaan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan		
Penerimaan dari BLUD	277.086.348.971,04	293.182.547.195,65
Penerimaan Lain-Lain		
Jumlah	277.086.348.971,04	293.182.547.195,65

5.3.1.2. Lain-Lain Pendapatan yang Sah

Lain-Lain Pendapatan yang Sah -LO per 31 Desember 2016 sebesar Rp496.135.000 naik sebesar Rp479.652.000 atau 2909,98% dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp16.483.000 akun ini merupakan hibah barang aset tetap dari PT. Bank Jateng dan PT. Bank BNI berupa Alat Angkutan dan PT. KIA Indonesia berupa Alat kantor dan Rumah Tangga (Berita Acara Hibah Terlampir), dengan rincian sebagai berikut :

	2016	2015
Hibah Alat Angkutan	492.070.000,00	16.483.000,00
Hibah Alat Kantor dan Rumah Tangga	4.065.000,00	
Jumlah	496.135.000,00	16.483.000,00

5.3.2. BEBAN

Belanja yang dimasukan dalam Laporan Operasional adalah Belanja yang telah diterbitkan dokumen pembayaran yang disahkan oleh pengguna anggaran dan barang telah diterima. Beban per 31 Desember 2016 sebesar Rp416.158.246.615,79 naik sebesar Rp25.237.806.384,79 atau 6,46% dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp390.920.440.231,00 dengan rincian sebagai berikut :

5.3.2.1. Beban Operasional

Beban Operasional per 31 Desember 2016 sebesar Rp416.158.246.615,79 naik sebesar Rp25.237.806.384,79 atau 6,46% dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp390.920.440.231 dengan rincian sebagai berikut :

	2016	2015
Beban Pegawai	116.649.635.950,00	119.185.324.838,00
Beban Barang & Jasa	240.934.033.374,17	209.978.071.436,16
Beban Penyusutan dan Amortisasi	58.025.351.124,65	61.378.544.581,23
Beban Lainnya	549.226.166,97	378.499.375,61
Jumlah	416.158.246.615,79	390.920.440.231,00

5.3.2.1.1. Beban Pegawai

Beban Pegawai per 31 Desember 2016 sebesar Rp116.649.635.950 turun sebesar Rp2.535.688.888 atau 2,13% dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp119.185.324.838, dengan rincian sebagai berikut :

	2016	2015
Beban Pegawai Tidak langsung	91.705.085.996	96.666.264.938,00
Beban Pegawai Langsung	24.944.549.954	22.519.059.900
Jumlah	116.649.635.950,00	119.185.324.838,00

5.3.2.1.2. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2016 sebesar Rp240.934.033.374,17 naik sebesar Rp30.955.961.938,01 atau 14,74% dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp209.978.071.436,16 dengan rincian sebagai berikut :

	2016	2015
Beban Persediaan	110.504.327.454,97	95.966.632.857,16
Beban Jasa	110.158.567.247,20	97.859.960.158,00
Beban Pemeliharaan	15.393.406.757,00	12.844.133.977,00
Beban Perjalanan Dinas	1.291.085.775,00	1.056.925.130,00
Beban Barang dan Jasa Lainnya	3.586.646.140,00	2.250.419.314,00
Jumlah	240.934.033.374,17	209.978.071.436,16

5.3.2.1.3. Beban Penyusutan/Amortisasi Aset

Beban Penyusutan/Amortisasi Aset per 31 Desember 2016 sebesar Rp58.025.351.124,65 turun sebesar Rp3.353.193.456,58 atau 5,46% dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp61.378.544.581,23 dengan rincian sebagai berikut :

	2016	2015
Beban Penyusutan Aset Tetap	57.761.200.424,65	50.119.631.153,69
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	-	-
Beban Penyusutan Aset tetap Rusak Berat	264.150.700,00	11.258.913.427,54
Jumlah	58.025.351.124,65	61.378.544.581,23

5.3.2.1.4. Beban Lain-Lain

Beban Lain-Lain per 31 Desember 2016 sebesar Rp549.226.166,97 naik sebesar Rp170.726.791,36 atau 45,11% dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp378.499.375,61 dengan rincian sebagai berikut :

	2016	2015
Beban Penyisihan Piutang	549.226.166,97	378.499.375,61
Beban Diragukan Tertagih Investasi Non Permanen	-	-
Beban Hibah Aset	-	-
Beban Penghapusan Aset	-	-
Beban Lain-Lain	-	-
Jumlah	549.226.166,97	378.499.375,61

5.3.3. Surplus/Defisit dari kegiatan Non Operasional

5.3.3.1. Surplus/Defisit Penjualan/Pelepasan Aset Tetap Non Lancar

Surplus/defisit Penjualan/Pelepasan Aset tetap Non Lancar digunakan untuk mencatat :

- Ø Apabila barang yang dihapuskan masih terdapat nilai buku (Nilai Perolehan – Akumulasi Penyusutan/amortisasi) maka selisih tersebut dicatat pada akun ini.
- Ø Apabila terjadi penjualan aset tetap maka selisih nilai buku dengan pendapatan yang diterima dari penjualan aset tetap merupakan surplus/defisit penjualan aset non lancar.

5.4. PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Merupakan komponen Laporan Keuangan yang menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos ekuitas awal, surplus/defisit LO pada periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas dan ekuitas akhir.

	2016	2015
1 Ekuitas Awal	558.636.228.395,79	486.509.339.540,57
2 Surplus/Defisit-LO	(138.575.762.644,75)	(97.721.410.035,35)
3 RK-PPKD	108.485.593.228,00	179.792.929.613,00
4 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	25.823.120.061,36	(9.944.630.722,43)
Koreksi/Penyesuaian Kas	26.063.596.941,02	(1.120.474.315,09)
Koreksi/Penyesuaian Piutang	(255.068.456,66)	(8.656.186.541,00)
Koreksi/Penyesuaian Penyisihan Piutang	-	196.636.333,95
Koreksi/Penyesuaian Persediaan	-	(31.113.970,70)
Koreksi/Penyesuaian Investasi Non Permanen	-	-
Koreksi/Penyesuaian Aset Tetap	(339.721.319,00)	(158.492.230,00)
Koreksi/Penyesuaian Penyusutan	90.162.196,00	(175.000.000,00)
Koreksi/Penyesuaian Aset Lainnya	264.150.700,00	-
Koreksi/Penyesuaian Amortisasi	-	-
Koreksi/Penyesuaian Penyusutan Aset Lainnya	-	-
Koreksi/Penyesuaian Lain-Lain	-	0,42
Ekuitas Akhir	554.369.179.040,39	558.636.228.395,79

BAB 6

PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

6.1. Gambaran Umum RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo

RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo semula merupakan fusi dari RSU Purwokerto yang berlokasi di Jl. Dr. Angka No.2 Purwokerto. RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo ini menempati satu paket rumah sakit yang terdiri atas dua lantai yang berlokasi di Jl. Dr. Gumbreg No.1 Purwokerto. Fungsionalisasi lokasi RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo diresmikan secara keseluruhan pada tanggal 12 November 1995. Dilihat dari aspek geografis lokasi RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo sangat menguntungkan, karena terletak di pusat pengembangan wilayah Jawa Tengah bagian selatan – barat, dan terletak di kota yang terus berkembang menjadi kota besar dan kota perdagangan, pendidikan, dan pariwisata. Dilain pihak kota Purwokerto terletak di pertemuan tiga jalur transportasi menuju pusat rujukan pelayanan kesehatan yang lebih tinggi, dengan jarak sekitar 200 km dari kota Semarang, Yogyakarta dan Bandung. Kondisi ini sangat strategis bagi pengembangan dan pemasaran RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto.

RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto sebagai RSUD milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam menyusun struktur organisasi dan tata kerja Rumah Sakit berpedoman pada Perda No.8 Tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah tahun 2008 No.8 seri D No.4 , tambahan Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah No.94). Dalam Peraturan Daerah (perda) No.8 tahun 2008 tersebut disebutkan bahwa Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut RSUD adalah lembaga teknis daerah yang merupakan unsur pendukung tugas Pemerintah Daerah dibidang pelayanan Rumah Sakit yang masing-masing dipimpin oleh seorang direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Untuk menunjang pengelolaan RSUD dapat dibentuk komite-komite, instasi, dan satuan pengawas intern yang pengaturannya ditetapkan dengan keputusan Direktur.

6.2. VISI, MISI, dan MOTTO RSUD Prof. Dr. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO

Visi

“Prima Dalam Pelayanan Sub Spesialistik Dan Pendidikan Profesi”

Misi

1. Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Rujukan Sub Spesialistik.
2. Menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat di Bidang Kesehatan.

3. Mengembangkan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Profesionalisme dan Kesejahteraan.
4. Mengembangkan Sarana dan Prasarana yang Unggul, Tepat, dan Aman.
5. Mengembangkan Sistem Manajemen Yang Handal, Transparan, Akuntabel, Efektif, dan Efisien.

Penjelasan Visi & Misi

RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto dalam memberikan pelayanan senantiasa berorientasi pada standar mutu & keselamatan pasien serta kepuasan pelanggan, baik dalam Pelayanan Sub Spesialistik maupun Profesi yang pengejawantahannya melalui pencapaian misi-misi setiap tahunnya.

MOTTO

“ Melayani Dengan Sepenuh Hati”

Penjelasan Motto

Segenap civitas hospitalia RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto memberikan pelayanan prima kepada semua pelanggan dengan dilandasi keikhlasan yang muncul dari hati tanpa membedakan suku, agama, ras & antar golongan serta status sosial, yang tidak hanya berbuah kebaikan tetapi sekaligus bernilai ibadah.

Mengacu pada Misi dan nilai-nilai dalam pencapaian Visi, maka strategi yang dipilih RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo sebagai factor kunci keberhasilan adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan Pelayanan Unggulan dengan pemanfaatan teknologi kedokteran;
2. Pengembangan manajemen mutu Rumah Sakit;
3. Pengembangan promosi dan kerjasama dengan pihak ketiga dalam hal pelayanan dan pendidikan;
4. Pengembangan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat;
5. Pengembangan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia sesuai standar profesi;
6. Pengembangan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit sesuai Standar Rumah Sakit Klas A;
7. Pengembangan manajemen organisasi meliputi manajemen keuangan dan manajemen perencanaan berbasis SIMRS;
8. Peningkatan kesejahteraan pegawai dengan penerapan sistem remunerasi yang adil dan proporsional

6.3. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Sesuai Perda No.8 Tahun 2008 maka RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo mempunyai tugas & fungsi sebagai berikut :

Tugas

Menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan upaya penyembuhan, pemulihan, peningkatan, pencegahan, pelayanan rujukan, dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat.

Fungsi

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pelayanan kesehatan;
- b. Pelayanan penunjang dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pelayanan kesehatan;
- c. Penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan;
- d. Pelayanan medis;
- e. Pelayanan penunjang medis non medis;
- f. Pelayanan keperawatan;
- g. Pelayanan rujukan;
- h. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
- i. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat;
- j. Pengelolaan keuangan dan akuntansi;
- k. Pengelolaan urusan kepegawaian, hokum, hubungan masyarakat, organisasi, dan tata laksana, serta rumah tangga, perlengkapan, dan umum.

Struktur Organisasi

Pada tahun 2007 Pemerintah Pusat telah menerbitkan PP 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagai pedoman penetapan SOTK Perangkat Daerah dan telah ditetapkan pula Perda No.8 tahun 2008 tentang SOTK RSUD & RSJ Provinsi Jawa Tengah dengan susunan Direktur dibantu oleh tiga Wakil Direktur dan Sembilan Kepala Bagian/Bidang serta 21 Subbagian/Subbidang. Perda tersebut telah dijabarkan pula dalam Pergub nomor 94 tahun 2008 dengan susunan sebagai berikut :

1. Direktur
2. Wakil Direktur Pelayanan & Kerjasama
3. Wakil Direktur Penunjang & Pendidikan
4. Wakil Direktur Umum & Keuangan
5. Kepala Bidang Pelayanan
6. Kepala Bidang Perawatan
7. Kepala Bidang Mutu & Kerjasama
8. Kepala Bidang Penunjang Medis
9. Kepala Bidang Penunjang Sarpras

- 10. Kepala Bidang Pendidikan & Penelitian
- 11. Kepala Bagian Umum
- 12. Kepala Bagian Perencanaan
- 13. Kepala Bagian Keuangan

Sumber Daya Manusia

Jumlah Karyawan per 01 Nopember 2016 sebanyak 1,770 orang (2015: 1.742 orang), dengan rincian sebagai berikut:

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
1. Tenaga Medis		
Struktural	34	34
Dokter spesialis	67	53
Dokter umum	32	34
Dokter gigi	3	4
Apoteker	24	20
Paramedis Non Perawatan	182	209
Perawat	742	723
Jumlah Tenaga Medis	1,084	1,077
2. Tenaga Non Medis	686	669
3. Total Karyawan	1,770	1,742

6.4. Bidang Usaha dan Kegiatan Utama

Fasilitas Pelayanan

Merujuk pada data pencapaian kinerja RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto, maka jenis-jenis pelayanan yang ada diantaranya adalah:

- 1. Pelayanan Rawat Darurat;
- 2. Pelayanan Rawat Jalan (24 Poliklinik VCT & PTRM) ;
- 3. Pelayanan Rawat Inap (28 Ruang perawatan);
- 4. Pelayanan Rawat Intensif (ICU, ICCU, HCU);
- 5. Pelayanan Bedah Sentral (16 Kamar Operasi);
- 6. Pelayanan Maternal Perinatal;
- 7. Pelayanan Rehabilitasi Medik;
- 8. Pelayanan Radiologi (Radiodiagnostik dan Radioterapi);
- 9. Pelayanan Farmasi;
- 10. Pelayanan Gizi RS;
- 11. Pelayanan Radioterapi;
- 12. Pelayanan Patologi Klinik;
- 13. Pelayanan Patologi Anatomi;
- 14. Pelayanan Hemodialisa;
- 15. Pelayanan Transfusi Darah;

- 16. Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan SDM;
- 17. Pelayanan Pengolahan Limbah;
- 18. Pelayanan Forensik dan Pemulasaran Jenazah RS;
- 19. Pelayanan Ambulance dan Mobil Jenazah;
- 20. Pelayanan Administrasi (Rumah Tangga, Keuangan, Kendaraan Dinas, Keamanan, Manajemen, SIM, Rekam Medis, Pemasaran, Perpustakaan).

Pengembangan Pelayanan Unggulan

Pelayanan unggulan yang ada di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo adalah sebagai berikut:

- 1. Onkologi Terpadu

Menurunkan angka kematian akibat keganasan, didukung alat radioterapi (cobalt) dan MRI (pencitraan jaringan tubuh)
- 2. Jantung Terpadu

Keterpaduan pelayanan untuk menurunkan angka kematian akibat penyakit jantung (Cathlab adalah alat katerisasi jantung).
- 3. Urologi

Menurunkan angka kesakitan gangguan saluran kencing (ESWL adalah alat pemecah batu ginjal menggunakan teknologi gelombang Elektromagnetik).
- 4. Maternal Perinatal

Menurunkan angka kematian ibu dan bayi dengan keterpaduan pelayanan PONEK (Pelayanan Obstetri Neonatus Emergency Komprehensif).
- 5. Private Wings

Pemenuhan pelayanan VIP merupakan bentuk terobosan subsidi silang untuk mendukung pelayanan pasien klas III.

Kapasitas Tempat Tidur

Kapasitas tempat tidur di RSUD Prof. Dr. margono Soekarjo Purwokerto berjumlah 749 Tempat Tidur terdiri dari :

No.	Kelas	Kapasitas
1	VIP	51
2	UTAMA	24
3	Klas I	127
4	Klas II	116
5	Klas III	319
6	Insentif VIP	5
7	Non Kelas	107
Jumlah Kapasitas		749

Sumber : <http://rsmargono.jatengprov.go.id/pelayanan/rawatinap>

Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit

- Gedung 2 lantai untuk kegiatan pelayanan gawat darurat, rawat jalan, dan rawat inap
- Gedung 3 lantai untuk kegiatan pelayanan bedah sentral terpadu dengan 16 kamar operasi, ruang ICU dan CSSD (diresmikan oleh Gubernur Jawa Tengah)
- Gedung 2 lantai untuk kegiatan pelayanan penunjang (Radiologi, Radioterapi, Patologi Klinik, Patologi Anatomi, Unit Transfusi Darah)
- Gedung pendukung pelayanan (asrama, hostel, dan gedung olah raga).

Pelayanan Rumah Sakit Berbasis SIM Rumah Sakit

- Sistem registrasi didukung sistem antrian
- Sistem rekam medik elektronik (pelayanan rawat jalan dan rawat inap)
- Sistem billing (akuntabilitas keuangan)
- Sistem LIS (laboratory information system)
- Sistem perencanaan berbasis elektronik (e-planning)
- Sistem klaim BPJS berbasis bridging 3 sistem (RS, BPJS, INA-CBG's)
- Sistem penilaian kinerja struktural (360 derajat) dan staf berbasis elektronik

BAB 7

PENUTUP

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan RSUD Prof. dr. Margono Soekarjo Purwokerto yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan RSUD Prof. dr. Margono Soekarjo Purwokerto untuk Tahun Anggaran 2016. Catatan atas Laporan Keuangan tersebut disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 64 Tahun 2013 tentang tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 120 tahun 2016 tentang Kebijakan dan Sistem Akuntansi Pemerintah Jawa Tengah. Kami berharap penyampaian Catatan atas Laporan Keuangan ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) serta memenuhi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, independensi, dan *fairness* dalam pengelolaan keuangan daerah.